

SKRIPSI

ERNA TRI WAHYUNI

TANGGUNGJUGAT PERS TERHADAP PEMBERITAAN DALAM MEDIA CETAK

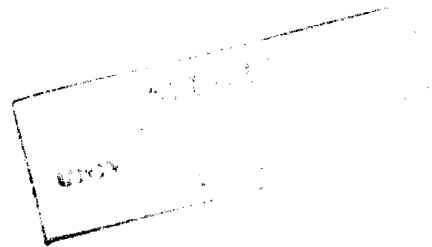


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

TANGGUNGJUGAT PERS TERHADAP PEMBERITAAN DALAM MEDIA CETAK

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing,

Prof. DR. Moch. Ishaeni, S.H., MS

NIP. 130 604 270

Penulis,

Erna Tri Wahyuni

NIM. 039614314

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 8 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Sri Handayani, S.H., M.Hum



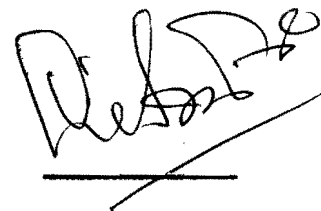
2. Anggota : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Lisman Iskandar, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Suatu pemberitaan yang dilakukan oleh pers adakalanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu pemberitaan, maka objek berita dapat mengajukan gugatan terhadap pers dengan berdasar pasal 1365 BW atau pasal 1372 BW.

1) Bila pengajuan gugatan berdasar pasal 1365 BW, maka harus dibuktikan apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum, apakah pelaku bersalah, apakah kerugian timbul sebagai akibat perbuatan tersebut, dan apakah norma yang dilanggar mempunyai "streking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Syarat-syarat dalam pasal 1365 BW, terpenuhi karena pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya (bertentangan dengan kewajiban pelaku), sebuah penerbitan pers sudah seharusnya

mengetahui dengan benar tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari adanya suatu pemberitaan dalam media cetak (kesalahan), kerugian yang diderita oleh objek berita timbul setelah adanya pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baiknya (hubungan kausal), dan norma yang dilanggar oleh pers adalah pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, dimana pasal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan sehingga pemberitaan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi objek berita.

Dengan terpenuhinya semua syarat pengajuan gugatan berdasar pasal 1365 BW, maka dapat dikenai tanggungugat.

- 2) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pers, dalam hal ini adalah pemberitaan, bisa dikenai pasal 1372 BW, bila pemberitaan diberitakan dengan sengaja untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan menurut masyarakat umum pemberitaan tersebut mencemarkan nama baik orang tersebut

sehingga tersinggung sedemikian rupa, untuk itu patut dimintakan perbaikan.

Bila timbul gugatan kepada pers seperti tersebut diatas, maka sesuai dengan penjelasan pasal 12 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang bertanggungjawab dihadapan hukum adalah Pemimpin Redaksi.

- b. Gugatan yang ditujukan kepada pers ini seharusnya tidak perlu, karena ada mekanisme jurnalistik yang harus dilayani oleh pers untuk membela dan membersihkan diri dari tuduhan, tudingan ataupun kemungkinan fitnah. Mekanisme ini disebut dengan hak jawab. Tetapi pelaksanaan hak jawab ini sendiri, masih terdapat banyak problematika, yaitu Permasalahan Teknis, Aspek Pemberitaan dan Akibat Hukum Hak Jawab.

Dari permasalahan teknis, yaitu mengenai pemuatan hak jawab dalam media cetak, dimana seringkali terlambat dalam memuat hak jawab, pemuatan hak jawab tidak seimbang dengan ruang dan halaman yang digunakan untuk pemberitaan yang dipermasalahkan.

Aspek pemberitaan ini bisa menjadi masalah dalam pelaksanaan hak jawab, bila dikaji dari ilmu komunikasi, karena dalam ilmu komunikasi, sebuah komunikasi tidak dapat dibalik (irreversible), maksudnya adalah sesuatu yang sudah disampaikan tidak dapat ditarik kembali dari ingatan atau persepsi penerimanya.

Bila akibat hukum dari hak jawab hanya ditinjau dari peraturan hukum positif, maka yang ada hanyalah sanksi hukum yang timbul bila hak jawab dilaksanakan oleh pers (pasal 18 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999). Sehingga adakalanya objek berita tetap mengajukan gugatan meskipun sudah diberikan hak jawab yang pantas dan memadai.

2. Saran

- a. Pers dalam setiap pemberitaannya harus selalu melaksanakan prinsip "cover both sides" atau berimbang dan adil dengan mengutamakan kecermatan dari kecepatan, meskipun dengan alasan dikejar "dead line", sehingga tidak akan timbul kerugian bagi seseorang akibat adanya suatu pemberitaan dalam media cetak.

b. Kalaupun timbul kerugian akibat adanya suatu pemberitaan dalam media cetak, maka untuk menghindari timbulnya gugatan, perlu diupayakan untuk membudayakan hak jawab yang tentunya dengan didukung oleh sistem hukum positif yang berlaku. Untuk mendukung pembudayaan hak jawab perlu adanya suatu ketentuan mengenai hak jawab. Dengan adanya ketentuan ini, maka fungsi dan efektifitas hak jawab akan lebih terjamin. Dalam ketentuan tersebut juga perlu diatur mengenai akibat hukum hak jawab, yaitu apakah dengan memberikan hak jawab yang pantas dan memadai, maka akan tertutup kemungkinan untuk menuntut atau menggugat persoalan yang sama ke pengadilan. Perlu juga diatur mengenai batasan-batasan bagaimana pemberian hak jawab yang pantas dan memadai. Dengan adanya ketentuan tersebut, selain lebih dapat menjamin fungsi dan efektifitas hak jawab, juga akan memberi perlindungan bagi pers dan objek berita.